

Dampak Gerakan Feminis Transnasional #MeToo terhadap Awareness Perempuan India Studi Kasus: Perlindungan dalam Kekerasan Domestik

Femy Triastia Hutabarat¹
Anggun Puspitasari²

Abstract

Human security is one of the most important factor to achieve internal security for a nation. Therefore, in order to achieve the security itself, there are many specific points that needs to be paid attention to, one of them is how to get the citizens to achieve their fundamental rights without any single boundaries such as class. In India's case, it was not as ideal as it is. There are many cases of domestic violence against women occurs and their inability to get the proper law advocation to the government. #MeToo campaign as feminist transnational movement is succeed on giving influence towards people of India on how important advocation and awareness to combat also to minimalize the chance of violence against women in order to achieve ideal protection and human security without gender, race, or class boundaries.

Keywords: *domestic violence, human security, #MeToo, transnational feminism, India*

Pendahuluan

Hak asasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aspek kehidupan manusia, terlepas dari segala golongan sehingga selalu dijadikan isu yang idealnya berdampingan dan menjadi faktor pertimbangan ulang dalam membuat suatu kebijakan dalam lingkup negara maupun non-negara. Namun pada realita, tidak jarang isu hak asasi manusia dikesampingkan karena berbagai hal, salah satunya adalah oleh kebudayaan. Masyarakat di setiap wilayah negara memiliki banyak sekali kebudayaan, salah satunya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki menurut Allan G. Johnson dalam bukunya yang berjudul *The Gender Knot : Unraveling Our Patriarchal Legacy* adalah kebudayaan yang mengkondisikan sebuah tatanan masyarakat yang didominasi oleh kaum pria, dimana pria adalah golongan

¹ Mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, Email: femmy.triastia@gmail.com

² Dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur

yang memiliki lebih banyak akses tanpa terbatas oleh standar sosial yang ditetapkan oleh masyarakat (Johnson, 2014 : 5).

Budaya patriarki ini sangat melekat di masyarakat, terlepas dari faktor manapun. Hal ini dipengaruhi oleh sisi biologis manusia dimana kaum pria memiliki kekuatan fisik yang cenderung lebih besar, yang diasumsikan dari jumlah massa otot yang lebih banyak dari kaum perempuan. Pandangan inilah yang membuat kaum pria menjadi diunggulkan dalam berbagai aspek. Berdasarkan pandangan tersebut, tidak jarang hak asasi bagi kaum perempuan pun terpinggirkan, dengan adanya perlakuan tersebut, banyak perempuan di berbagai wilayah negara melakukan upaya dalam menyetarakan hak mereka. Gerakan penyetaraan hak bagi kaum perempuan dimulai dari beberapa literatur terkemuka yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft dan Jane Austen pada era tahun 1750 hingga 1814-an (Rampton, 2015). Literatur yang diangkat oleh penulis terkemuka tersebut mengenalkan konsep harga diri, kecerdasan, dan potensi mendasar yang dimiliki oleh kaum perempuan, sehingga menjadi dasar pemikiran bagi kaum perempuan pada zamannya untuk memahami hak yang dimilikinya, salah satunya adalah hak dalam pemilihan politik di negara yang terkait (Tauchert, 2002 : 5).

Upaya persamaan hak bagi kaum perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai isu kesetaraan gender antar kaum pria dan perempuan terangkat ke publik dikarenakan oleh meningkatnya kemampuan literasi dan pemahaman individu maupun kelompok dalam mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai individu maupun dalam ranah publik, yang juga berbanding lurus akan ketidaksetaraan hak yang semakin luas terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut mendorong banyak aksi kolektif lokal hingga menjadi sebuah aktivitas masyarakat transnasional yang bergerak di bidang kesetaraan hak bagi perempuan. Salah satunya adalah kampanye lokal yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kampanye dengan tagar #MeToo, yang berkembang secara masif dalam tingkat global sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sebuah gerakan transnasional dalam Studi Hubungan Internasional yang berisikan berbagai golongan masyarakat dengan tujuan yang sama, dengan tujuan persuasi dalam peningkatan kepedulian dan keberanian bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan domestik. Kampanye sosial media ini menjadi fenomena yang mampu menarik perhatian massa dari berbagai negara, salah satunya adalah India, yang merupakan sebuah negara dengan tingkat kekerasan domestik yang tinggi dalam penyiksaan secara psikologis yang bervariasi seperti pengurungan di rumah hingga sampai ancaman cerai (Hackett, 2011).

Tingkat ketidaksetaraan antara pria dan perempuan menjadi hal yang normal terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat India, dimana menurut norma sosial yang ada pada masyarakat, perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan kaum pria. Kaum perempuan hanya bertugas dan berhak menjadi ibu rumah tangga, dengan pandangan bahwa pernikahan merupakan tujuan hidup bagi seluruh perempuan di India, dimana kaum pria menjadi pihak yang dominan yang mengontrol seluruh kehidupan kaum perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki akses dalam bidang material, seperti mencari pekerjaan, maupun pemenuhan hak dasarnya sebagai manusia untuk tidak mendapatkan kekerasan secara fisik maupun psikologis (ICRW, 2000 : 4).

Berdasarkan penelitian yang terkait akan peran kaum pria dan perempuan dalam konstruksi sosial di India, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa India merupakan negara penganut kebudayaan yang bersifat maskulin. Dalam beberapa jurnal terkait, peran kaum pria dapat didefinisikan dalam tiga peran, yaitu penyedia, pelindung, serta penggerak. Ketiga peran ini merupakan peran yang sangat krusial dalam pemenuhan hak individu maupun kelompok. Hal ini sangat dipercaya sebagai peran yang hanya dapat

dilakukan oleh kaum pria karena mereka telah dipersiapkan untuk menjalankan peran tersebut, sehingga tidak jarang para kaum pria memiliki strata pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan oleh kaum perempuan (ICRW, 2002 : 8).

Realita mengenai pandangan mengenai peran perempuan dan pria di India terlihat jelas dalam salah satu pendapat seorang petani dari distrik Churu :

"Hamare samaj me aurat bahar nahi jati hai, nahi bahar service karti hai, jaise aur aurate karti hai, wo hum logon ko acha nahi lagta hai. Vaise hamare gaon me primary school tha to padti thi uske baat ghar par rahati thi." (ICRW, 2002: 9)

(Dalam komunitas kami, perempuan tidak dibiasakan untuk pergi jauh, ataupun bekerja di luar rumah seperti perempuan pada umumnya di luar sana karena kami tidak menyukainya. Di desa kami terdapat sekolah dasar yang bisa didatangi oleh perempuan di sini sehingga mereka dapat mengenyam bangku hingga sekolah dasar lalu tinggal di rumah mengurus rumah tangga.)

Terlepas dari ketidakmampuan kaum perempuan dalam memenuhi hak individunya karena terbatas oleh norma sosial yang ada, kaum perempuan tidak jarang mengalami kekerasan domestik secara psikologis maupun fisik. Seperti salah satunya adalah menghadapi stereotip yang diciptakan oleh media bagi para kaum perempuan, seperti banyaknya iklan peralatan rumah tangga yang identik dengan perempuan dengan pria sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan tidak kondusifnya kondisi rumah pribadi yang disebabkan oleh buruknya kualitas peralatan rumah tangga serta ketidakmampuan perempuan dalam menggunakannya, serta terdapat salah satu tayangan serial televisi berjudul *Swayamsiddha* (Perempuan Independen), yang mengisahkan bagaimana pemeran utama yang merupakan seorang perempuan tidak mampu mengurus rumah tangga dan membutuhkan bantuan pria di hidupnya sehingga mampu memiliki hidup yang layak dan penuh komitmen (Geetanjali, 2007 : 76).

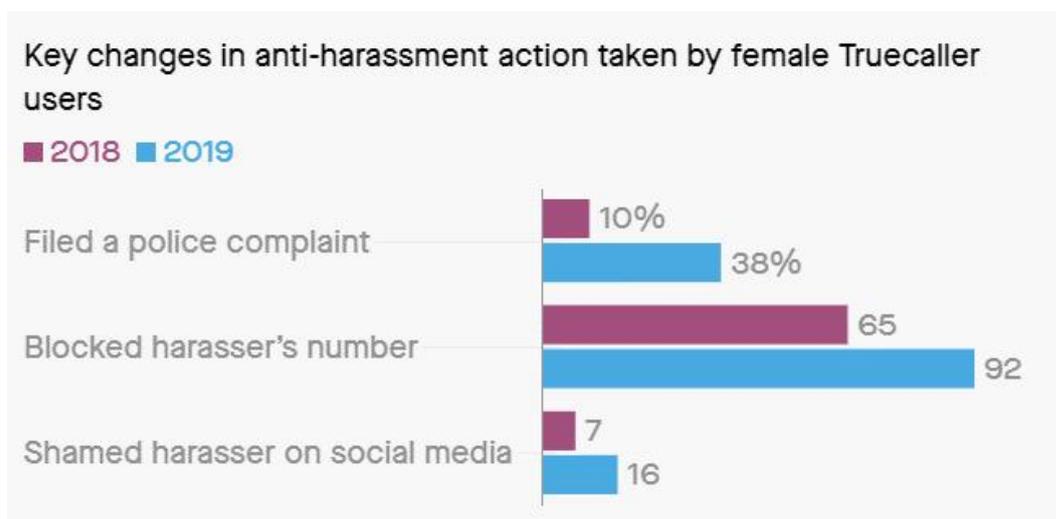
Tidak hanya hal tersebut, terdapat pandangan dalam kehidupan sosial India secara umum dimana kasus pemerkosaan bukan tindak kriminal, melainkan sebuah efek dari kelalaian perempuan dalam bertingkah laku di ranah publik (The Quint, 2018). Dengan adanya realita tersebut, gerakan persamaan hak serta upaya advokasi merupakan sebuah urgensi di India, dengan adanya gerakan #MeToo yang menyebar secara global di sosial meda, mampu meningkatkan kesadaran bagi kaum perempuan di India, dengan harapan mampu meningkatkan tindakan dari pemerintah untuk meningkatkan upaya advokasi maupun penanganan terhadap kekerasan domestik melalui pengaplikasian kebijakan yang terkait.

Gerakan kampanye transnasional #MeToo merupakan sebuah aksi sosial pada ruang lingkup global yang mengacu kepada persamaan hak perempuan akan kebebasannya dari segala bentuk kekerasan yang dialami. Hal ini terjadi di India, dimana praktik kekerasan domestik sangat tinggi. Dengan adanya keterbukaan media yang merupakan ciri khas negara dengan ideologi demokrasi, menyebabkan gerakan kampanye ini mampu masuk kedalam kehidupan sosial bermasyarakat India. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan mengenai bagaimana dampak gerakan feminis transnasional #MeToo terhadap *awareness* perempuan India pada perlindungan kekerasan domestik.

Pembahasan

Kampanye #MeToo yang tersebar secara global di berbagai wadah sosial media pada tahun 2017 mampu menarik perhatian berbagai kalangan perempuan di India pada tahun 2018. Penyebaran tren kampanye ini dimulai dari sektor hiburan Bollywood. Penggunaan tagar #MeToo di India pertama kali digunakan oleh seorang aktris bernama Tanushree Dutta yang menuduh seorang produser film bernama Nana Patekar terkait melakukan pelecehan seksual kepadanya dalam shooting film "Horn OK Pleassss" yang dilakukan pada tahun 2008 (The Economic Times, 2019). Kasus ini menjadi perhatian publik karena mengadukan kasus kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang dialami oleh kaum perempuan merupakan hal yang tidak biasa dan berhasil menginspirasi banyak aktris yang melakukan hal yang sama. Beberapa diantaranya adalah kasus yang dialami oleh beberapa aktris lainnya seperti Sandhya Mridul dan seorang penulis naskah film Vinta Nanda mengangkat kasus kekerasan seksual yang dialami 9 tahun lalu oleh aktor yang sama, Alok Nath. Dalam ranah politik, kampanye #MeToo ini berhasil mengangkat kasus kekerasan seksual pada beberapa perempuan yang dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri India, M.J Akbar. Kasus ini berhasil menyita perhatian masyarakat agar kasus ini diselesaikan secara hukum dan berakhir kepada pengunduran diri dari M.J Akbar, yang memberikan statement kepada publik melalui akun twitternya, @mjakbar (The Wire, 2018).

Beberapa contoh kasus diatas merupakan momentum awal adanya gerakan #MeToo di India. Dengan mengadopsi pola kampanye yang sama dengan kampanye di Amerika Serikat yang diinisiasikan oleh figur publik, banyak kaum perempuan dari berbagai kalangan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka dapatkan. Kampanye ini mampu meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual dalam berbagai cara seperti kekerasan fisik maupun dalam media lainnya serta pelecehan bukanlah sebuah kebiasaan yang harus dimaklumkan. Berdasarkan survey independen, terhitung hingga pertengahan tahun 2019, sekitar 40% kaum perempuan mengalami pelecehan seksual dari pesan singkat maupun telepon (Quartz India, 2019)



Gambar 1. Peningkatan Jumlah Tindakan Kaum Perempuan Wilayah Urban Terhadap Pelecehan Seksual *via* Telepon tahun 2018-2019

Sumber : Quartz India, 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa adanya peningkatan dengan rata-rata 10% dari tahun 2018, hal ini menjelaskan bahwa kesadaran perempuan di India akan pentingnya perlindungan diri serta mengupayakan adanya secara garis besar mengalami peningkatan terhadap kesadaran akan upaya perlindungan diri serta menimbulkan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual yang dilakukan melalui media telepon.

Fenomena kampanye #MeToo yang terjadi di India merupakan sebuah gerakan feminisme yang mampu berada di masyarakat karena adanya keterbukaan media, yang merupakan salah satu ciri dari sebuah negara dengan ideologi demokrasi serta sebuah contoh kasus yang sesuai dengan teori Feminisme posmodernisme, yang memberikan asumsi bahwa lingkungan lokal maupun global memiliki sifat *male-oriented*, sehingga demi mencapai kesetaraan dalam penerimaan hak tanpa mengenal batas gender, dibutuhkan sebuah pemberdayaan (Stromquist, 1995 : 14). Gerakan kampanye transnasional #MeToo ini juga berhasil menginspirasi gerakan feminis lokal di berbagai negara seperti yang juga terjadi di India, seperti *Women's March For Change* yang dilakukan di 20 wilayah India (QRius, 2019). Gerakan *Women's March* di India ini mengangkat berbagai isu penting dalam kesetaraan hak tanpa mengenal batasan gender, beberapa di antaranya adalah perjuangan hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang sesuai, serta hak untuk tidak mendapatkan kekerasan seksual dalam ruang publik maupun kekerasan domestik, serta mengumpulkan upaya dan mengorganisir gerakan akar rumput lainnya yang bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan maupun lainnya. Selain itu, terdapat gerakan berbasis sosial media lainnya dalam aplikasi twitter dengan nama akun @IndiaMeToo, akun ini berisi berbagai berita serta perkembangan gerakan kampanye #MeToo di India, serta membantu pengangkatan kasus kekerasan domestik maupun tindak kekerasan seksual di publik lainnya dalam berbagai kiriman. Akun ini di kurasikan oleh seorang jurnalis dan koresponden independen asal New Delhi, Rituparna Chatterjee.

Selain dalam memperjuangkan persamaan hak, para demonstran perempuan ini memperjuangkan pengaplikasian secara jelas terhadap Undang-Undang mengenai kekerasan seksual di tempat bekerja yang telah disahkan pada tahun 2013, serta pengaplikasian hukuman terhadap mahar yang berakibat pada kekerasan domestik di India (India Briefing, 2018). Undang-undang tersebut merangkap berbagai regulasi sebagai berikut :

1. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku
2. Kepengurusan organisasi terkait pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja
3. Keharusan dalam mendirikan *Care and Complain Centre* bagi kantor yang memiliki tenaga kerja lebih dari (sepuluh) orang
4. Memberikan fasilitas sesuai bagi pekerja
5. Mengamankan kehadiran saksi dalam persidangan terkait kekerasan seksual (*The Sexual Harrasment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Bill, 2012)*)

Regulasi kekerasan seksual di tempat kerja serta pelarangan terhadap kasus kekerasan domestik akibat budaya mahar dianggap bagi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, karena kasus kekerasan seksual di tempat kerja maupun tempat tinggal selalu menjadi permasalahan terbesar bagi kaum perempuan di India. Hal tersebut tidak sesuai dengan ideal sebuah kebijakan publik, yang secara definisi dapat diartikan sebagai seluruh tindakan maupun aktivitas pemerintah secara langsung maupun melalui agen yang mampu mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, dalam hal ini mampu meminimalisir tindakan kekerasan, domestik maupun publik yang dialami oleh seluruh kaum perempuan

di India. Berdasarkan model formulasi kebijakan publik *black box* menurut Easton, masukan (*input*) dan umpan balik (*feedback*) didapatkan dari berbagai hal, seperti dari realita yang terjadi di masyarakat, serta dari kelompok yang berkepentingan, dengan keluaran (*output*) yang merupakan hasil dari masukan dan umpan balik tersebut (Easton, 1965 : 60).

Dalam hal ini, kaum perempuan di India berperan sebagai masukan dan umpan balik dalam proses pembuatan kebijakan terkait. Pada masukan, terlihat bahwa kaum perempuan telah mengalami berbagai macam kekerasan domestik maupun di wilayah publik yang banyak dilakukan oleh kaum pria dengan berbagai macam faktor, seperti salah satunya adalah kentalnya budaya patriarkis di India. Dengan realita tersebut, pemerintah India sebagai pembuat keputusan, harus bertindak sehingga mencapai sebuah keamanan masyarakat yang ideal dan keamanan internal sebuah negara. Pada proses umpan balik (*feedback*), kampanye #MeToo berfungsi sebagai tren yang mampu menghasilkan pandangan baru kepada masyarakat, secara khusus adalah kaum perempuan India bahwa pencapaian hak dalam mendapatkan advokasi hukum dari pemerintah merupakan sebuah urgensi, sehingga mampu meningkatkan awareness dan pada akhirnya mampu meningkatkan proses umpan balik evaluasi kebijakan terkait perlindungan akan kekerasan domestik menjadi lebih maksimal.

Setelah mendapatkan masukan dari realita masyarakat, pemerintah India akan membuat sebuah kebijakan dalam model *black box* menurut Easton, yaitu sebuah proses yang bersifat situasional sehingga menghasilkan sebuah kebijakan terkait dalam realita masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam proses masukan. Bagian keluaran adalah kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah kebijakan Pelarangan Mahar tahun 1961, Pasal Pidanaan Kekerasan Kepada Perempuan, serta Undang-Undang Kekerasan Kepada Perempuan Di Tempat Kerja tahun 2013. Dalam tahap *output*, undang-undang ini diberlakukan kepada publik, dengan harapan sesuai dengan realita masyarakat. Namun pada tahapan ini, kampanye #MeToo sebagai tren berbasis sosial media belum mampu mencapai pada tahap mempengaruhi adanya perubahan maupun pengetatan kebijakan dari pemerintah, dikarenakan oleh periode tren yang relatif baru sehingga dibutuhkan proses yang bersifat jangka panjang (*Long term process*).

Demonstrasi kaum perempuan merupakan hal yang jarang terjadi di India, dikarenakan minimnya kesadaran kaum perempuan terhadap hak fundamentalnya, sehingga momentum kampanye #MeToo merupakan sebuah katalis dalam pencapaian hak dasar kaum perempuan di India. Dalam mencapai hal tersebut, teori feminisme mengenal istilah pemberdayaan. Terdapat empat tahap keberdayaan dalam proses pemberdayaan pada asumsi studi feminisme (Rowlands, 1997: 13) :

1. *Power over*, atau upaya melawan aturan yang berlaku sehingga menjadi sebuah entitas dengan power yang unggul
2. *Power to*, atau upaya menciptakan kesempatan tanpa adanya upaya dominasi
3. *Power with*, pandangan dimana setiap permasalahan akan terselesaikan dengan adanya upaya kolektif
4. *Power within*, keberdayaan yang datang dari dalam diri

Dalam model keberdayaan tersebut, kasus pemberdayaan kaum perempuan di India membutuhkan poin-poin keberdayaan ini, yaitu *power to*, *power with*, *power within* dengan tujuan berupa *power over* . Dengan kebudayaan patriarkis India yang menonjol, dibutuhkan peran eksternal yang mampu menjadi pemantik keberdayaan tersebut. Pada kasus ini adalah adanya gerakan kampanye transnasional #MeToo yang tersebar di sosial

media, sesuai dengan tujuan adanya sebuah gerakan transnasional dalam sebuah sistem internasional yang berfungsi sebagai agen perubahan.

Peran kampanye transnasional #MeToo di India ini adalah sebagai faktor pendorong eksternal dengan menargetkan masyarakat dengan permasalahan pencapaian hak dasar yang sama. Dengan posisi tersebut, pola pengaruh gerakan transnasional ini adalah sebagai *people to people contact* dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi mengingat penyebarannya menggunakan sosial media. Setelah itu, dengan pengaruh yang diberikan oleh gerakan transnasional #MeToo yang berhasil memberikan tren baru terhadap upaya pencapaian hak fundamental bagi kaum perempuan untuk tidak mendapatkan maupun menjadi korban kekerasan domestik, sehingga dengan tren tersebut, gerakan transnasional #MeToo berhasil membangun keberdayaan perempuan dari dalam diri (yang terlihat dari upaya pengaduan dan pengangkatan kasus kekerasan seksual kepada publik dan menempuh jalur hukum oleh beberapa figur publik di India), dan menghasilkan pandangan bahwa permasalahan ini adalah sebuah fenomena yang mampu diupayakan dengan gerakan kolektif seperti demonstrasi maupun upaya gerakan akar rumput lainnya karena ditemukan bahwa pengaplikasian kebijakan yang tidak maksimal, serta dalam proses tersebut, dibutuhkan pengupayaan kesempatan dalam meningkatkan kepedulian akan pentingnya persamaan hak tersebut. Dengan tercapainya pemberdayaan tersebut, akan membentuk sebuah pola hubungan *people to government*, dimana masyarakat menyuarakan haknya agar mendapatkan upaya advokasi yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di India.

Meskipun begitu, pengaruh besar gerakan kampanye feminis transnasional ini tidak sepenuhnya lancar. Terdapat berbagai hambatan yang terjadi, beberapa di antaranya adalah banyak asumsi yang tersebar kepada publik bahwa kampanye ini dan berbagai gugatan yang diberikan kepada berbagai figur publik serta kaum pria lainnya yang tertuduh melakukan kekerasan domestik maupun bentuk kekerasan pada perempuan lainnya sebagai pencemaran nama baik serta masih banyak kaum perempuan yang memilih untuk tidak menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan berbagai penjelasan serta studi kasus di atas, terlihat bahwa gerakan transnasional mampu mempengaruhi upaya pencapaian hak fundamental manusia di suatu negara. Meskipun masuknya tren gerakan transnasional #MeToo ini masih terbilang singkat, tetapi mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran upaya pencapaian hak dasar perempuan untuk tidak menjadi korban kekerasan domestik serta mendapatkan hak advokasi yang sesuai dari pemerintah dan regulasi hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Fenomena kampanye transnasional berbasis sosial media #MeToo merupakan sebuah kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan keberanian para kaum perempuan untuk menyuarakan haknya akan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Kampanye transnasional ini berhasil mengubah pandangan lingkup sosial masyarakat lokal maupun global untuk tetap terus menyuarakan haknya untuk mendapatkan advokasi yang sesuai dari pemerintah. Hal ini pun terjadi di India, dengan tingkat praktik kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, dan pengupayaan advokasi yang minim terhadap kasus terkait. India sebagai negara berideologi demokrasi, terdapat keterbukaan media yang menjadi ciri khasnya, sehingga sebuah gerakan feminis transnasional #MeToo yang berbasis sosial media mampu dengan mudah menjadi sebuah tren dan mampu mengubah perspektif dan meningkatkan keberanian kaum perempuan dalam menyuarakan haknya untuk tidak menjadi korban kekerasan domestik serta kekerasan lainnya, dan menuntut adanya tindak advokasi yang sesuai dengan regulasi hukum kepada pemerintah.

Penelitian ini mencakup bagaimana #MeToo mampu menjadi sebuah tren global pada tahun 2017 hingga berhasil menjadi tren di India pada tahun 2018 hingga sampai tahun 2019. Tren ini berhasil meningkatkan awareness kaum perempuan India untuk menyuarakan hak advokasinya kepada pemerintah. Kampanye ini masih bersifat *on-going*, namun telah membawa dampak peningkatan *awareness* bagi kaum perempuan India terhadap pentingnya perlindungan akan kasus kekerasan domestik, dengan tujuan pada skala jangka panjang, akan mampu meningkatkan upaya pemerintah untuk memperketat kebijakan terkait perlindungan perempuan akan kasus kekerasan domestik.

Referensi

- Allan (2014). *The Gender Knot : Unraveling our patriarchal legacy*. Pennsylvania, University Press.
- Easton, David. (1965). *A System Analysis of Political Life*. New York : John Wiley & Sons
- Geetanjali, Gangoli. (2007). *Indian Feminisms : Law, Patriarchies, and Violence in India*, Cornwall : Ashgate Publishing Limited
- Hackett, Michelle. (2011). "Domestic Violence against Women: Statistical Analysis of Crimes across India" dalam *Journal of Comparative Family Studies*. https://www.jstor.org/stable/41604436?read-now=1&seq=9#page_scan_tab_contents diunduh 2 April 2019
- India Briefing, (16 Oktober 2018), "#MeToo Movement in India: The Sexual Harassment Law and HR Best Practices", <https://www.india-briefing.com/news/metoo-india-sexual-harassment-law-hr-best-practices-11303.html/> diakses 2 Juli 2019
- International Center for Research on Women. (2000). *Domestic Violence in India : A Summary Report of a Multi-Site Household Survey*. Washington DC : International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities
- International Center for Research on Women. (2002). *Men, Masculinity and Domestic Violence in India : Summary Report of Four Studies*. Washington DC : International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities
- QRius, (05 April 2019), "Hundreds of Women March across India for their Rights: All About the Growing Movement You Haven't Heard Of", <https://qrius.com/hundreds-of-women-march-across-india-for-their-rights-all-about-the-growing-movement-you-havent-heard-of/>, diakses 2 Juli 2019
- Quartz India, (08 Maret 2019), "The #MeToo Effect : More urban Indian Women are Acting Against Offensive Calls and Text Messages", <https://qz.com/india/1567185/womens-day-metoo-led-more-indian-women-to-report-harassment/>
- Rampton, Martha. (2015). *Four waves of Feminism*. Pacific University Oregon
- Rowlands, Jo. (1997). *"Questioning Empowerment " Working with Women in Honduras*. Oxfam : Dublin
- Stromquist N. P, (1995), "The Theoretical and Practical Bases for Empowerment," dalam *Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy*, Hamburg : UNESCO Institute of Education
- Tauchert, Ashley. (2002). *Mary Wollstonecraft and the Accent of the Feminine*. New York, United States of America: Palgrave
- The Economic Times, (01 Juni 2019), "2018: The Year When #MeToo Shook India", <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/2018-the-year-when-metoo-shook-india/2018-the-year-of-metoo-in-india/slideshow/66346583.cms>
- The Quint, (2018), Rape is Consensual: Inside Haryana's Rape Culture, India : Quintillion Media – Bloomberg. www.thequint.com. Diakses 26 Mei 2019

The Wire, (09 Oktober 2018), "M.J. Akbar, Minister and Former Editor, Sexually Harassed and Molested Me", <https://thewire.in/media/mj-akbar-sexual-harassment> diakses 30 Juni 2019